BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dapat dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) dan (2) dan (3) tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal menjamin adanya suatu sarana bagi upaya hukum terkait pemilihan kepala daerah, dimana ketentuan pada pasal tersebut memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus yang seharusnya sudah terbentuk sebelum pemilu serentak 2024 namun hingga saat ini masih belum ada upaya konkret dari pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut.
2. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dengan dinyatakan Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuk nyabandan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

B. Saran

1. Diharapkan dalam kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi dicantumkan secara spesifik di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UUD 1945
2. Perlu bagi pemerintah untuk memprioritaskan RUU terkait perubahan undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengenai pasal-pasal yang tidak berlaku lagi agar terciptanya kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan seterusnya.